

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejak nabi Adam dan istrinya Siti Hawa berada di permukaan dunia yang fana ini, kejahatan acap kali terjadi, kejahatan berulang-ulang terjadi didalam pergaulan masyarakat, kendatipun masyarakat membenci kejahatan itu sendiri. Tidakkah salah apa yang diungkapkan oleh filosof kenamaan bangsa yunani yang bernama Plato, beliau menyatakan : “*ibi societas* (dimana ada masyarakat) *ibi crimen* (disitu ada kejahatan). Kejahatan (*crime*) adalah suatu patologi social (suatu penyakit masyarakat) yang tidak dapat dibasmi dan ditumpas sampai keakar-akarnya. Tidakkah berbeda bila mana seseorang manusia yang menderita sakit, setelah diberi obat dan sembuh, muncul lagi penyakit-penyakit yang sama atau penyakit yang lainnya, yang bisa dan dapat ditanggulangi adalah gejala-gejalanya (*symptom*). Tidakkah keliru kalau ada yang mengemukakan “kejahatan adalah abadi seabadinya adanya umat manusia di muka bumi ini. Namun demikian kejahatan apapun haruslah dicegah dan dibasmi sebab kejahatan adalah suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat mengganggu sendi-sendi hubungan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Mengganggu ketertiban umum. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi didalam masyarakat diperlukan ketentuan-ketentuan hukum. Dengan perkataan lain ketentuan-ketentuan hukum antara lain bertujuan agar ketertiban

dalam masyarakat terwujud kembali seperti semula sehingga anggota masyarakat dapat melakukan aktifitas-aktifitasnya dengan baik.

Dengan demikian terwujudlah suatu “*ibi societates, ibi crimen, ibi ius*” dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan dan disitu ada hukum”.

Segala bentuk kejahatan haruslah diproses melalui hukum, orang siapapun dia apakah pejabat, rakyat, konglomerat, orang melarat, bilamana melakukan kejahatan harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum diharamkan main hakim sendiri (*eigen richting*), karena perbuatan main hakim sendiri bertentangan dengan suatu Negara Hukum (*rule of law, rechtsstaat*).

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Hukum (*rechtsstaat, rule of law*), hal mana dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>

Ini berarti setiap orang sama dimuka hukum tanpa kecuali. Sebagai suatu Negara hukum siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka pelakunya haruslah dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di muka Pengadilan yang berkompeten. Bilamana pelaku terbukti dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Keterangan saksi

---

<sup>1</sup>Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan I Sampai IV Dalam Satu Naskah. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta, hlm 5

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dan hakim yakin akan kesalahan pelakunya (terdakwa) hakim harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>2</sup>

Putusan (vonis) hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde zaak, binding force*) haruslah dijalankan, dieksekusi setelah putusan hakim mempunyai kekuatan yang tetap, statusnya menjadi terpidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 10 ayat (1) nya menyebutkan :

“terpidana yang diterima dilembaga pemasyarakatan wajib di daftar”

Ayat (2) nya menyebutkan :

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap. Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. Pustaka Kartini 1993, hlm 801

“pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status terpidana menjadi narapidana”

Berkenaan penjatuhan hukuman atau pidana kepada terdakwa, maka tidak dapat dipungkiri hukuman yang dijatuhkan itu merupakan suatu pembalasan oleh karena terdakwa telah melakukan suatu kejahatan. Dengan perkataan lain, bahwa “konsekuensi dari dilakukannya suatu kejahatan adalah dengan sendirinya dijatuhkan hukuman (*quia peccatum*)”.<sup>3</sup> Hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan. Apakah hukuman itu pada aturannya akan bermanfaat itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan.

Pada dasarnya negaralah yang berhak untuk menghukum. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan pidana adalah Negara, karena negaralah yang berhak memerintah. Diberikannya hak kepada Negara untuk menghukum pelaku kejahatan, agar dapat mempertahankan ketertiban dalam Negara. Beysens mengatakan bahwa sudah menjadi kodrat alam bahwa Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, karena itu pula Negara berhak untuk mengusut, menuntut, mengadili dan menjatuhkan pidana.

Menurut Kant : “hukuman adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan”.<sup>4</sup> Namun didalam Negara Republik Indonesia maka seseorang

---

<sup>3</sup> E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas Bandung 1960, hlm 180

<sup>4</sup> Ibid, hlm 180

narapidana itu haruslah dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, harus berprikemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 12 ayat (1) nya menyebutkan :

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan;
- e. Kriteria lainnya dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan;

Ini berarti adanya klasifikasi terhadap para narapidana dalam menjalankan masa pembinaan; warga binaan haruslah diperlakukan sedemikian rupa sejalan dengan amanat undang-undang. Dengan demikian harus diadakan pemisahan antara lain :

- 1. Yang recidivis dan yang bukan recidivis.
- 2. Yang tindak pidana berat dan yang ringan (ancaman hukumannya).
- 3. Macam tindak pidana yang dilakukan.
- 4. Dewasa, anak-anak.
- 5. Laki-laki dan wanita dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan:

Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan;

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenali setelah Lapas di Indonesia tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)

“Departemen Hukum Dan HAM sebagai payung system pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan system pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik”<sup>5)</sup>

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Ini berarti bimbingan dan penyuluhan harus harus berdasarkan falsafah Pancasila. Penyuluhan dan bimbingan harus berdasarkan asas-asas Pancasila kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya. Harus ditanamkan jiwa gotong royong, toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan dan lain-lainnya. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan bahwa narapidana adalah penjahat, sebaliknya ia harus selalu dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

---

<sup>5)</sup>DirektoratJenderalPemasyarakatanDepartemenHukum dan Ham RI, CetakBiruPembaharuanPelaksanaanSistemPemasyarakatan 2009, hlm 136.

Petugas Lapas tidak berhak bersikap atau melontarkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaannya. Segala bentuk label negatif sedapat mungkin dihapuskan, misalnya cara pemberian makanan, perawatan, tempat tidur.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, antara Lain :

a. Pasal 5 menyebutkan :

“setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani”

b. Pasal 9 menyebutkan :

“setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

c. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan :

“setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”

Ayat (2) menyebutkan :

“pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”

Menurut Bapak Sahardjo yang dikenal tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan ,telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana dengan alasannya :

1). Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;



- 2). Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- 3). Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para Pembina maupun Pemerintah yaitu bagaimana Pembina mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.<sup>6)</sup>

Saat seseorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah :

“kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

---

<sup>6)</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1995, hlm 13

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, secara eksplisit pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam ranah tata peradilan pidana kemudian haruslah diterapkan di dalam suatu sistem yang jelas sehingga pada pelaksanaannya tersebut pemasyarakatan itu sendiri menjadi efektif untuk diterapkan dan diberlakukan. Pasal 1 ayat ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatakan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”<sup>7)</sup>

Sistem pemasyarakatan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa system pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan;
- c. Pendidikan;

---

<sup>7)</sup> U U No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>8)</sup>

Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan fungsi, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>9)</sup>

- 1. Melakukan pembinaan narapidana;
- 2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3. Melakukan bimbingan social atau kerohanian narapidana;
- 4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
- 5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

---

<sup>8)</sup>Marlina, *HukumPenitensier*, Cetakan Satu, Juni, Bandung 2011, hlm 26

<sup>9)</sup>RomliAtmasasmita, *Dari PemenjaraanKePembinaanNarapidana*, Alumni Bandung, Alumni Bandung 1975, hlm 127

Jadi fungsi lembaga pemasyarakatan yakni tempat melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan social kerohanian terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib lembaga pemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha rumah tangga.

Namun demikian dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan napi ini banyak menghadapi hambatan dan berdampak pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Tidak hanya permasalahan adanya kelebihan hunian, daya tamping hunian, di lembaga-lembaga pemasyarakatan (LAPAS), tetapi di lembaga pemasyarakatan tertentu adanya perlakuan khusus istimewa bagi narapidana korupsi, pemberian fasilitas istimewa, antara lain ruangan kamar yang ber AC, kulkas, televise dan sebagainya.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan system pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap lembaga pemasyarakatan. Sistem keamanan untuk menjamin terlaksananya pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Apabila semua proses tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan yang meliputi narapidana,

tahanan, anak didik pemsyarakatan, petugas lembaga pemsyarakatan, sehingga penyelenggaraan pembinaan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi, tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemsyarakatan.

Pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemsyarakatan, pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999) yakni dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan;
3. Program pembimbingan;

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bahwasanya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi diantaranya hak untuk hidup, dan hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman. Hal tersebut pada prinsipnya telah melanggar hak asasi manusia dari

warga binaan sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif, dalam membangun bangsa dan negara;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat;<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam rangka pembinaan narapidana ini terdapat perlakuan-perlakuan khusus bagi narapidana-narapidana korupsi (narapidana politik, korupsi dan gembong-gembong narkoba). Jelas perlakuan-perlakuan, pemberian fasilitas istimewa tidak hanya bertentangan dengan asas kesederajatan di muka hukum juga

---

<sup>10)</sup> Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, cetakan pertama November Jakarta 1983, hlm 17

bertentangan dengan tujuan dari pembinaan warga binaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak akan terwujud yakni antara lain tidak merasa kapok, tidak merasa malu, mereka merasa tidak menjalani pidana, tidak merasa takut untuk melakukan tindak pidana lagi dan sebagainya.

Adanya perlakuan khusus, istimewa dan fasilitas-fasilitas tertentu terhadap narapidana, hal tersebut jelas tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga; perlakuan istimewa dan fasilitas-fasilitas tertentu (koruptor) sudah barang tentu bertentangan dengan sistem negara hukum (*rule of law*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>11</sup>). Berkaitan dengan negara hukum ini maka Sri Soemantri mengatakan :

“bahwa suatu negara hukum haruslah memnuhi empat unsur terpenting, yakni :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan hak asasi manusia (HAM)
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan
4. Adanya pengawasan (dari badan badan peradilan)”<sup>12</sup>

Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rule of law*) mengakui dan menjamin asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) terhadap

---

<sup>11</sup> Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945, Visi Media Jakarta 2007, hlm 40

<sup>12</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, hlm 32

siapapun baik ia pejabat maupun rakyat, baik menteri maupun petani dan lain lainnya. Demikian pula halnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, haruslah dilakukan perlakuan yang sama oleh para pejabat LAPAS. Apakah warga binaan lembaga pemasyarakatan tersebut pelaku tindak pidana umum (pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya) atau tindak pidana khusus (antara lain tindak pidana korupsi) haruslah diperlakukan sama oleh petugas-petugas LAPAS. Tidak diperkenankan perlakuan yang berbeda karena para warga binaan Lapas tersebut sama-sama warga binaan yang harus menjalani masa hukuman tersebut. Pemberian fasilitas-fasilitas khusus terhadap para napi koruptor, narkoba, illegal logging dan lain-lainantara lain fasilitas kamar yang berpendingin (AC), kulkas, televisi, kursi dan meja yang serbabagus, kamar mandi yang bersih, persediaan air di kamar mandi, mudahnya keluar masuk Lapas, adanya ruangan-ruangan khusus dan lain-lain sebagainya, merupakan suatu perbuatan yang tidak patut diberikan pada para napi tersebut. Sebab fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan ini tidak hanya bertentangan dengan asas keadilan yang dirasakan oleh warga binaan Lapas yang pada akhirnya menimbulkan rasa kecemburuan sosial dan bertentangan dengan tujuan dari pembinaan oleh Lapas.

Dengan perkataan lain di tinjau dari perspektif hukum pemasyarakatan tujuan dari dari pembinaan dalam undang-undang. No.12 tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Warga Binaan Permasyaratan

Larangan Bagi Narapidana Pasal 4 Permenkumham 6 Tahun 2013



Setiap narapidana dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;

- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan

v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Merujuk pada perbuatan yang dilarang bagi narapidana di atas, maka setiap narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya; memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya; dan melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

Jadi, tindakan narapidana memiliki fasilitas seperti itu di sel atau kamar huniannya merupakan hal yang dilarang.

Hukuman Bagi Narapidana yang Memiliki Fasilitas Mewah di Lapas

Apakah hukuman bagi narapidana yang melengkapi kamar huniannya dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya atau melanggar larangan lainnya yang telah diatur?

Perlu diketahui bahwa Narapidana yang melanggar tata tertib dijatuhi:

Pasal 8 Permenkumham 6 Tahun 2013

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau

- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi: Pasal 9 ayat (1)

Permenkumham 6 Tahun 2013

- a. memberikan peringatan secara lisan; dan
- b. memberikan peringatan secara tertulis.

Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi: Pasal 9 ayat (2)

Permenkumham 6 Tahun 2013

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: Pasal 9 ayat (4)

Permenkumham 6/2013

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berupa “melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian” dapat dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat. Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Narapidana atau Tahanan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.

Perlu di luruskan bahwa hukuman bagi narapidana yang melakukan pelanggaran itu dijatuhi berdasarkan Permenkumham 6/2013 dan terpisah/berbeda dari pidana penjara yang dijalani oleh narapidana tersebut. Hal ini karena pidana penjara bagi narapidana dijatuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh hakim.

Oleh karena itu, jika narapidana melakukan pelanggaran memiliki fasilitas mewah di kamar huniannya untuk kepentingan pribadi, maka ia diberikan hukuman disiplin tingkat berat, bukan diperberat hukuman pidananya. Salah satu bentuk hukuman disiplin tingkat berat itu adalah memasukkan narapidana yang bersangkutan ke sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

#### Faktor Penegak Hukum

Kelalaian/ ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya

tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah prosesnya, yaitu proses interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, yang didukung dengan program-program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuannya, karena hal ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan, yakni secara aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru SDM petugas pemasyarakatan saat ini belum dapat secara optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa: “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan

pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”. Berdasarkan ketentuan di atas, diatur mengenai bidang-bidang yang menjadi tugas petugas pemasyarakatan yaitu di bidang pembinaan, pengamanan dan

pembimbingan warga binaan kemasyarakatan yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan narapidana berdaya guna dan berhasil guna. Dalam melakukan suatu pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana. Ketentuan yang mengatur mengenai Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur pada Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, 22Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan,

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan Pemasyarakatan paling kurang 5 (lima) tahun; dan
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Dalam ketentuan di atas, menunjukkan masih lemahnya kualitas dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas khusus yang dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkannya suatu aturan bahwa syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung artian bahwa Wali Pemasyarakatan

merupakan petugas yang telah di didik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada narapidana. Kendala pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi lembaga pemasyarakatan mempengaruhi keberhasilan pembinaan narapidana, selain itu narapidana yang terlalu banyak tidak

sesuai dengan daya tampung lembaga pemasyarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif, tidak adanya pengawasan terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan membuat longgarnya pelaksanaan pembinaan serta kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi kendala dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan narasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada saat ini masih terdapat kekurangan/ kelemahan, antara lain:

- a. Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas khusus yang dibebankan kepada pegawai pemasyarakatan.
- b. Masih belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasyarakatan khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas
- c. Masih minimnya tenaga-tenaga ahli, seperti: dokter, psikolog,
- d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas pemasyarakatan.

Dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi atau menghambat kinerja pemasyarakatan, selain itu permasalahan overcapacity menjadi penyebab



kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu perilaku perlakuan khusus. kiranya harus perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan yang masih banyak terdapat disejumlah Lapas antara lain:

a. Pelaksanaan pembinaan masih memperlihatkan adanya kecenderungan orientasi pada penutupan dengan penerapan kebijakan yang menitikberatkan pada pendekatan keamanan.

b. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana belum disesuaikan dengan bakat, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana sehingga belum ada pola yang jelas dan terarah berkenaan dengan pekerjaan narapidana.

c. Belum adanya pembagian tentang jenis-jenis pekerjaan yang jelas, baik dalam kategori keterampilan maupun pekerjaan produktif. Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi dalam efektifitas pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di atas, maka menunjukkan bahwa selain persoalan over capacity, penyebab belum efektifnya pembinaan narapidana juga disebabkan karena timbulnya ketidakdisiplinan aparat penegak hukum/kemampuan aparat penegak hukum, terutama mengenai pegawai sipir dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan aturan mengenai syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa masih lemahnya kualitas dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas khusus yang dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkannya suatu aturan bahwa syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung arti bahwa Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah dididik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada narapidana.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan 16 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bahwa: Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar pengaman.
- b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dengan areal terbuka pada bagian tengahnya.
- c. Areal terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat makan bersama ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam lingkup satu Blok hunian.

d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dapat dilakukan pengelompokan bangunan (cluster) tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya.

e. Semua teralis dan pintu pada blok ini menggunakan besi baja Ø 22 mm.

Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

f. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5 m (2) Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah sebagai berikut:

a. Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m<sup>2</sup>/orang;

b. Langit-langit :

1) Langit-langit hunian terbuat dari bahan beton/cor dengan ketebalan 10 cm dan tinggi langit-langit kamar hunian 3,8 m;

2) Langit-langit teras (Lantai I) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 4 cm, yang sekaligus berfungsi sebagai lantai teras (lantai II);

3) Langit-langit teras (Lantai II) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 10 cm.

c. Lantai hunian dan lantai teras (Lantai I) dicor beton dan dilapisi dengan bahan anti kimia;

d. Dinding :

1) Dinding yang merupakan bagian luar dari bangunan blok terbuat dari bahan beton bertulang K-500 dengan ketebalan 20 cm dan diberi tulangan Ø 12 mm berjarak 10 cm;

2) Dinding lainnya terbuat dari dinding batu bata tebal ½ bata dengan pasangan 1 pc : 2 ps, diplester halus; 3) Pada dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi terbuat dari jeruji Ø 22 mm, ukuran disesuaikan dengan luas kamar.

e. Dilengkapi dengan penerangan (lampu) yang dipasang tertanam (inbouw) diatas.

f. Pada tiap kamar hunian disediakan WC dan tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm, tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%.

g. Pintu mengikuti standar Pintu Kamar Hunian.

h. Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela ukuran disesuaikan dengan luas kamar, dengan spesifikasi :

1) daun pintu terbuat dari jeruji besi baja 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm;

2) kusen terbuat dari besi plat, tebal 6 mm tertanam pada beton.

Pengaturan mengenai ruangan pembinaan diatur pada Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana

Teknis Pemasyarakatan

membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM PEMASYARAKATAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertolak dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana dilihat dari perspektif hukum pemasyarakatan?
2. Factor-faktor apakah sehingga terjadinya perlakuan khusus tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana dilihat dari perspektif hukum pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemberian dan perlakuan istimewa bagi narapidana (koruptor).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik tentang pentingnya penanganan dan perlindungan terhadap perlakuan khusus terhadap narapidana dalam perspektif hukum pemasyarakatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan terjadinya pemberian dan perlakuan khusus terhadap warga binaan narapidana koruptor serta memberikan bahan masukan untuk mencegah setidaknya meminimalisasi terjadinya perlakuan pemberian fasilitas khusus bagi narapidana koruptor.
- b. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan perlakuan dan pemberian fasilitas khusus terhadap warga binaan koruptor.
- c. Serta memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pelaksanaan undang-undang, Pemerintah maupun masyarakat secara luas khususnya Lembaga Pemasyarakatan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk Pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan (pembangunan di berbagai sektor kehidupan) melainkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional berdasarkan pada perdamaian abadi. Kata ”melindungi” yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap warga Indonesia untuk mencapai keadilan dan persamaan dimuka hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut



oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu system hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Sila kedua Pancasila menyatakan bahwa“ Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Ketentuan sila diatas menyatakan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan sama di segala bidang baik kehidupan dan dimuka hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Menurut Sudargo Gautama :<sup>13</sup>

“Negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang. Dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak kekuasaan negara hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang, dan badan peradilan yang bebas kedudukannya dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan yang semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan walau pun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri”

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :<sup>14</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

---

<sup>13</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung 1983, hlm 3

<sup>14</sup> Ibid, hlm 23

Menurut Friedrich Julius Stahl ada empat unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
- b. Negara didasarkan pada teori trias politika, pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wettsmatigbestuur*).
- c. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrecht matige over heidsdaad*).

Sri Sumantri mengatakan bahwa suatu negara hukum haruslah memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya hanya berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap HAM.
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
- d. Adanya pengawasan (badan-badan peradilan).

Albert Veen Dicey memberikan negara hukum sebagai berikut (*Anglo Saxon* mempergunakan istilah *the rule of law*) mengatakan bahwa :<sup>17)</sup>

1. Supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary* dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah.

---

<sup>15)</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni Bandung 2003. Hlm 35

<sup>16)</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung 1992

<sup>17)</sup> Mien Rukmini, op-cit, hlm 36-37

2. Kesamaan dihadapan hukum atau penundukkan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary of the land*.
3. Prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen.

Negara dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga agar manusia tetap dihormati sebab dari itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut ilmu hukum pidana, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana yang berupa keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu harus dilakukan. Unsur-unsur ini meliputi :
  - a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
  - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
  - c. Unsur lain yang menentukan tindak pidana;
  - d. unsur yang memberatkan pidana;
  - e. unsur tambahan yang menentukan tindak pidana;
  - f. unsur atau sifat yang melawan hukum;
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana, meliputi :
  - a. Kesengajaan (*dolus*)

- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachterade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*)

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu system pembinaan yang sejak dulu dikenal dan dinamakan system pemasyarakatan. Karena system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>18)</sup>

Dengan demikian pembinaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; mengedepankan perlakuan yang sama terhadap warga binaan. Tidak diperkenankan adanya penyimpangan-penyimpangan terkait dengan

---

<sup>18)</sup>DwidjaPriatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung 2013, hlm 3

pemberian fasilitas, perlakuan khusus, akses-akses dan lain-lainnya. Di lembaga pemasyarakatan jelas adanya perlakuan-perlakuan khusus, pemberian fasilitas-fasilitas, akses-akses dan sebagainya berujung tidak tercapai pembinaan terhadap warga binaan. Kedekatan dan adanya hubungan emosional para warga binaan dengan para petugas Lapas haruslah dicegah terutama warga binaan kasus korupsi.

Hukum pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembedaan. Dalam hal ini Prof. Sudarto mengatakan bahwa :<sup>19)</sup>

“Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah “penghukuman”.

Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret yang

---

<sup>19)</sup> PAF. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina Cipta Bandung 1987, hlm 17

menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis pidana juga memuat aturan-aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu.<sup>20)</sup>

Pada dasarnya negaralah yang berhak untuk menghukum. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan pidana adalah Negara, karena negaralah yang berhak memerintah. Diberikannya hak kepada negara untuk menghukum pelaku kejahatan, agar dapat mempertahankan ketertiban dalam negara. Bysens mengatakan bahwa sudah menjadi kodrat alam bahwa negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, karenaitu pula negara berhak untuk mengusut, mengadili dan menjatuhkan pidana.

Hukuman yang dilakukan jaman dahulu tidaklah seperti sekarang ini. Dahulu hukuman merupakan siksaan yang tidak berperikemanusiaan, sekarang hukuman diberikan harus didasarkan kepada rasa kebersamaan sebagai manusia, sehingga hak asasi yang dimiliki seorang narapidana harus dilindungi dan diperhatikan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu kepenjaraan diganti dengan system kemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam lapas dilakukan pemisahan atas dasar laki-laki dan wanita, orang yang sudah dewasa dan anak-anak, orang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain, orang militer dengan orang sipil.

---

<sup>20)</sup>Dwidja Priatno, *Op-cit*, Bandung 2013, hlm 9

Berdasarkan falsafah negara, diharapkan pelaksanaan sistem tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai terlaksana dengan baik dan narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidana baik yang masih berada dalam lapas atau pun yang sudah berada di lingkungan masyarakat.

Sistem pembinaan dilakukan terhadap narapidana pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kebanyakan orang pada umumnya, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana memiliki spesifikasi tertentu dan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembinaan berdasarkan sistem pembinaan.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa :

“Prinsip-prinsip pembinaan diberikan pada saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi sesuai UU Pemasarakatan Pasal 1 ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Dalam hal ini terpidana kehilangan kemerdekaannya tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam system pemasarakatan Indonesia”

Narapidana diberikan pembinaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga



dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Ini berarti dalam rangka pembinaan oleh petugas lapas narapidana harus sesuai dengan tujuan pembinaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juncto Peraturan Pemerintah tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Agar tidak terulangnya kembali perlakuan yang khusus dan lain-lainnya Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pada narapidana tindak pidana korupsi, perlu dilakukan pembenahan di LAPAS khususnya mengenai lemahnya mekanisme pengawasan. Artinya Pembenahan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Ham. Serta jajaran dibawahnya mendesak perlu dilakukan “ketiadaan pertanggungjawaban yang jelas dari kepala divisi pemasyarakatan dan kepala lembaga Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kiranya sebagai hal yang menyumbang pada lembaga mekanisme pengawasan, sehingga terjadinya pemberian fasilitas istimewa pada narapidana tertentu. Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas maka diharapkan dalam perspektif hukum pemasyarakatan, perlakuan khusus tersebut kiranya dapat diminimalisir.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>21</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistmtatis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup> Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”.<sup>23</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat perskriftif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriftif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriftif ini merupakan suatu yang substansial didalam ilmu hukum, dan tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21)</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3 UI Press, Jakarta 1986, hlm 3

<sup>22)</sup> Ibid, hlm 42

<sup>23)</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cet ke 2 Jakarta 2006, hlm 32

<sup>24)</sup> Ibid, hlm 22

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>25)</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat tentang kebijakan tentang perlakuan khusus terhadap narapidana dalam perspektif hukum pemyarakatan.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.<sup>26)</sup> Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>27)</sup> Dikatakan penelitian hukum

---

<sup>25)</sup> Soerjono Soekanto. Op-cit, hlm 43

<sup>26)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cet ke 4. Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 11

<sup>27)</sup> Ibid, hlm 9

doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dalam hal ini, penulis mengkaji data sekunder mengenai kebijakan tentang pemberian perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu pada Lembaga Pemasyarakatan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan.<sup>28)</sup> Data yang dipergunakan dalam penulisan dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

---

<sup>28)</sup> Soerjono Soekanto. Op-cit, hlm 66

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengumpulkan bahan hukum sebagai alat untuk mengkaji masalah hukum yang terkait dengan kebijakan tentang pemberian perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu pada Lembaga Pemasyarakatan, yang meliputi :

- a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>29</sup>, yang terdiri dari :
  1. Norma dasar Pancasila;
  2. Peraturan dasar; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR;
  3. Peraturan perundang-undangan, yang relevan dan atau Peraturan perundang-undangan sebagai bahan komparasi;
  4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat;
  5. Yurisprudensi.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu hasil karya ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan pemberian perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu pada Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>29)</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op-cit. hlm 11

- c. Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, artikel, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.

## **5. Analisis Data**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola penelitian dapat lebih bebas karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Serta dengan pendekatan yuridis empiris bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.